

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan karakter atau sikap bangsa Indonesia sudah diupayakan melalui berbagai bentuk, namun hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. tercermin dalam proses pembelajaran, di era globalisasi sekarang sering terjadinya konflik atau pertengkaran antar teman, disebabkan karena kurang mampu menghargai dan menerima perbedaan pendapat. Pembentukan karakter atau sikap dapat ditumbuhkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan karakter sebagai basis dalam mendorong sikap dan tindakan peserta didik menuju karakter yang baik (Mujtahidin, 2017: 12). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan untuk menganut teori konstruktivisme karena paradigma konstruktivisme merupakan respon terhadap berkembangnya harapan-harapan baru berkaitan dengan proses pembelajaran yang menginginkan peran aktif siswa dalam merencanakan dan memprakarsai kegiatan belajarnya sendiri (Aunurrahman, 2014: 15-16).

Guru harus merubah paradigma selama ini yang menempatkan dirinya sebagai pusat sumber belajar menjadi fasilitator dan motivator yang mengondisikan siswa untuk belajar. Proses pembelajaran berlangsung demokratis, guru bukan pemegang otoritas kebenaran. Justru proses dialog guru dan siswa yang harus dikembangkan sehingga dalam kegiatan pembelajaran diperoleh

sebuah reaksi yang menghasilkan nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran baru dan kontekstual (Mulyoto, 2013: 50-51).

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh peneliti. Pada Senin, 12 November 2018 di SDN Mundusewu 03 Bareng Jombang bersama guru kelas V yaitu Bapak M. Khoirul Anwar, S.Pd.SD bahwa pembelajaran PKn yang dilakukan guru dikelas V SDN Bareng 3 Jombang masih kurang optimal dalam menanamkan sikap demokratis. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kondisi seperti: 1) Pada proses pembelajaran guru sebagai sumber belajar siswa diposisikan sebagai penerima dan mencatat informasi, sehingga informasi hanya terjadi satu arah dari guru ke siswa, 2) Sikap demokratis kurang tertanam pada diri siswa karena siswa kurang mampu berinteraksi tercermin pada saat dibentuk kerja kelompok siswa kurang berinteraksi dengan teman-temannya mereka cenderung individual dalam mengerjakan tugas, pada saat guru menanyakan hasil diskusi cenderung jawaban siswa tidak sama sering terjadi pertengkaran karena tidak mau menerima pendapat temannya, dan 3) Guru lebih mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuan siswa karena guru menganggap bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai dilihat dari nilai siswa yang rata-rata diatas KKM. Beberapa keadaan di atas menimbulkan permasalahan dalam kurikulum pembelajaran PKn SD.

Kurikulum PKn SD digunakan untuk membentuk dasar-dasar nilai dan moral yang kuat bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) pengembangan sikap (afeksi) harus diutamakan agar peserta didik dapat terbentuk dengan baik, sebab jenjang pendidikan sekolah dasar merupakan peletak dasar

pertama untuk membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang bermoral karena pada jenjang inilah bakal-bakal tunas bangsa akan dibentuk kepribadiannya (Mujtahidin, 2017: 16-17). Hakikatnya mata pelajaran PKn yaitu mata pelajaran yang menekankan pada pembentukan kewarganegaraan bagi peserta didik, melalui pendidikan nilai dan moral yang bertujuan untuk membentuk sikap, karakter, dan kepribadian peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*.) (Mujtahidin, 2017: 3). Pendidikan kewarganegaraan selain mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air juga bertugas mengembangkan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab (Winarno, 2014: 20). Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, siswa harus bisa berkembang secara positif dan demokratis dalam menanggapi persoalan atau permasalahan yang ada, sehingga mampu berinteraksi dan hidup bersama dengan masyarakat. Jika guru kurang menanamkan karakter ataupun sikap pada siswa maka, pembelajaran PKn kurang optimal.

Sikap demokratis merupakan sikap untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain yang sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Mujtahidin (2017: 59) demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap demokratis diharapkan mampu digunakan peserta didik dalam menghargai dan menerima pendapat orang lain seiring dengan adanya perkembangan zaman. Sehingga jika guru kurang bahkan tidak menanamkan sikap demokratis pada peserta didik, maka tidak tercapainya suatu tujuan pembelajaran PKn. Tujuan pembelajaran PKn diharapkan dapat membentuk peserta didik yang mengenal jati dirinya

sebagai bangsa indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, jujur, peduli saling berbagi, gotong royong, demokratis, terampil, dan tangguh sehingga tercipta generasi bangsa yang bermoral, yang disebut *smart and good citizenship* atau warga negara yang cerdas dan baik (Mujtahidin, 2017: 6). Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga membantu siswa untuk mampu berpikir kritis, dan rasional dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan, untuk itu siswa diharapkan mampu mengambil sikap terhadap permasalahan yang ada disekitarnya karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat. Menurut Mujtahidin (2017: 14) karakteristik berpikir kritis diupayakan dalam pembelajaran PKn, agar terwujudnya negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam negara demokrasi yang didasari dengan sikap demokratis. Pembelajaran tersebut akan membuat siswa mampu berpikir kritis, peka dan responsif terhadap permasalahan sosial.

Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran telaah yurisprudensi. Menurut Uno (2016: 31) model telaah yurisprudensi melatih siswa untuk peka terhadap permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Model pembelajaran ini digunakan untuk melatih siswa agar dapat menghargai maupun menerima pendapat orang lain terhadap suatu masalah yang bertentangan dengan sikap yang ada pada dirinya. Kelemahan dalam model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama dan siswa dituntut untuk berfikir yang lebih

tinggi, sehingga dalam pembelajaran ini guru juga harus memiliki kreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran telaah yurisprudensi termasuk kelompok model interaksi sosial, Menurut Aunurrahman (2014) dalam model interaksi sosial, proses pembelajaran harus dapat menjadi wahana untuk mempersiapkan siswa agar dapat berinteraksi secara luas dengan masyarakat. Model interaksi sosial dirancang dengan memanfaatkan kerjasama antara siswa melalui berbagai bentuk kegiatan nyata aktifitas pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun diluar kelas. Model interaksi sosial didasarkan pada dua asumsi pokok. (1) masalah-masalah sosial dapat diidentifikasi dan dipecahkan melalui kesepakatan bersama melalui proses-proses sosial dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, (2) proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan dalam upaya perbaikan sistem kehidupan sosial masyarakat secara terarah dan berkesinambungan.

Menurut penelitian terdahulu, penelitian yang pernah dilakukan oleh Narulita (2017) dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Menggunakan Model Telaah Yurisprudensi Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa kelas IV SDN Tanjung Jati 1 Kamal” dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran PKn dengan menggunakan model telaah yurisprudensi terhadap sikap nasionalisme siswa kelas IV SDN Tanjung Jati 1 Kamal. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Dewi (2018) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT) Terhadap Sikap Demokratis Siswa” dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan penggunaan metode VCT terhadap sikap demokratis siswa pada mata pelajaran PKn sebesar $0,035 < 0,05$.

Berdasarkan permasalahan diatas dan beberapa penelitian yang mendukung, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi Terhadap Sikap Demokratis Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh model telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang?
- 2) Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model telaah yurisprudensi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya uraian permasalahan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yakni meliputi:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang.

- 2) Mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model telaah yurisprudensi siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam memberikan informasi tentang pengaruh model telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada mata pelajaran PKn.

2. Manfaat praktis

- a Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru, yaitu dapat memberikan salah satu alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan model pembelajaran telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

- b Bagi Siswa

Siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan berfikir kritis, Sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn.

c Bagi peneliti

Mendapatkan pengetahuan mengenai model yang cocok diterapkan pada proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn. dan mampu menumbuhkan sikap demokratis pada siswa.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai jawaban sementara dari peneliti ini yang berjudul “Pengaruh Model Telaah Yurisprudensi Terhadap Sikap demokratis pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang”. Sebagai berikut:

Ho: tidak ada pengaruh model pembelajaran telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang.

Ha: ada pengaruh model pembelajaran telaah yurisprudensi terhadap sikap demokratis pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN Mundusewu III Bareng Jombang.